PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Rabu Tanggal: 12 Maret 2014 Halaman: 4

JELANG PEMILIHAN UMUM

Wawali: Waspada Anggaran Abal-abal

YOGYA (MERAPI) - Penggunaan anggaran di luar perencanaan atau anggaran abal-abal pada tahun politik ini rawan muncul. Wakil Walikota Yogyakarta Imam Priyono meminta seluruh pegawai di lingkup pemkot mewaspadai hal tersebut karena akan memunculkan masalah.

"Jika tiba-tiba ada kegiatan tanpa perencanaan, itu pasti anggaran abal-abal. Anggaran abal-abal tentu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kami tidak ingin hal seperti itu terjadi," papar Imam saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2014 di Balaikota Yogyakarta, Selasa (11/3).

Imbauan itu disampaikan agar dugaan pelanggaran terkait proyek pergola di tahun anggaran 2013 tidak terulang. Untuk mengantisipasinya aparat pemerintah dan warga diminta mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran. Terutama kegiatan di wilayah.

Seluruh kelurahan juga diminta memberikan informasi tentang kegiatan dan program yang akan dilakukan selama satu tahun anggaran. Termasuk besaran dana yang akan digunakan.

"Informasi rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan ditempel di kelurahan. Jadi masyarakat dapat melihat dan bisa mengawasinya," ujarnya.

Dia menegaskan anggaran Pemkot sudah disusun berdasarkan basis aktivitas, sehingga semuanya diserap untuk pelaksanaan kegiatan. Dalam Musrenbang itu para tokoh masyarakat juga diminta mempersiapkan hal yang dibutuhkan di wilayahnya, sehingga dapat terakomodasi.

Musrenbang diikuti seluruh kepala dinas, lurah, camat dan tokoh masyarakat. Pembahasan Musrenbang 2014 akan dilakukan sampai 26 Maret untuk merumuskan kegiatan tahun berikutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta Ali Fahmi mendukung peran serta masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Selama ini peran masyarakat dalam pengawasan hanya terhenti pada formalitas Musrenbang di wilayah.

"Pengawasan belum dilakukan saat kegiatan dilakukan. Peran serta masyarakat perlu ditingkatkan. Pemkot harus memaparkan program dan kegiatan di wilayah," papar Fahmi.

Terkait Musrenbang dia mengatakan hal yang perlu disoroti adalah kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan. Misalnya dalam bidang kesehatan dan jaminan pendidikan. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005